



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA ASEAN

Jalan Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp. (+62-21) 3509059, 3509058, Fax. 3509050

KEPUTUSAN
SEKRETARIAT NASIONAL ASEAN

NOMOR: 001/KEP/SETNASASEAN/07/2022

TENTANG
NOTULA RAPAT PLENO SEKRETARIAT NASIONAL ASEAN
PADA 10 JUNI 2022
TENTANG SOSIALISASI DAN TINDAK LANJUT KTT KHUSUS ASEAN – AS

1. K/L akan proaktif dalam menyikapi inisiatif AS yang merupakan tindak lanjut dari *Joint Vision Statement* dan komitmen AS yang tertuang dalam *Fact Sheet ASEAN – U.S. Special Summit*. Meskipun sejumlah area kerja sama yang dibahas telah dilakukan di badan sektoral, K/L perlu menerapkan prinsip kehati-hatian agar inisiatif tidak melanggar kedaulatan Indonesia, seperti dalam kerja sama keamanan laut dan kesehatan.
2. Inisiatif AS, baik melalui ASEAN maupun bilateral, berada dalam konteks geopolitik saat ini, khususnya dalam rivalitas AS dan RRT. Dalam kaitan ini, K/L akan mengantisipasi inisiatif AS terkait kerja sama dengan badan penyelenggara keamanan maritim (yang salah satunya diwujudkan melalui penempatan atase *coast guard*), peningkatan *maritime domain awareness*, dan kontribusi vaksin melalui Quad.
3. K/L akan mengantisipasi upaya pemerintah AS untuk dapat mendorong iklim bisnis yang kondusif bagi sektor swastanya melalui perubahan regulasi di negara-negara ASEAN, khususnya terkait standar lingkungan, tenaga kerja, serta perlindungan data dalam pengembangan kapasitas dan infrastruktur digital.
4. K/L telah mengidentifikasi prioritas Indonesia pada area kerja sama, sebagai berikut:
 - a. Pelatihan vokasi
K/L akan memanfaatkan inisiatif AS berupa peningkatan kapasitas teknis, membangun koneksi antar universitas, peningkatan kapasitas guru Bahasa Inggris.
 - b. Kesehatan
K/L akan memanfaatkan mekanisme dialog ASEAN – AS di bidang kesehatan yang baru saja terbentuk untuk meningkatkan kapasitas tenaga medis dan pendirian *ASEAN Public Health Emergency Coordination System*. Namun K/L akan mengantisipasi kerja sama pemantauan *respiratory disease* melalui kantor *U.S. Centre for Disease Control* di Hanoi agar tidak membahayakan ketahanan kesehatan di kawasan atau melanggar kedaulatan maupun keragaman genetika Indonesia seperti terjadi di masa lalu (NAMRU).
 - c. Teknologi dan inovasi
K/L akan memanfaatkan inisiatif terkait peningkatan digitalisasi dengan menyesuaikan regulasi nasional, khususnya terkait *blockchain application*.

- d. Transportasi
K/L akan melanjutkan inisiatif Indonesia untuk mendorong AS dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di kawasan, termasuk untuk pengembangan regulasi kelayakan kendaraan listrik.
 - e. Perubahan iklim
K/L akan memanfaatkan mekanisme badan sektoral lingkungan hidup antar ASEAN – AS guna meningkatkan kesiapan kawasan untuk adaptasi perubahan iklim. K/L sepakat untuk mengantisipasi kolaborasi dengan sub-national actor dalam konteks penanganan dampak perubahan iklim dan tetap mengacu pada *nationally determined contributions* (NDCs) di bawah Paris Agreement.
 - f. Transisi Energi
K/L akan memanfaatkan bantuan AS untuk mendorong transisi energi di ASEAN sesuai dengan implementasi *ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation* (APAEC).
 - g. Maritim
K/L akan memanfaatkan tawaran peningkatan kapasitas badan penyelenggara keamanan maritim di ASEAN untuk peningkatan *maritime domain awareness*, termasuk pengoperasian alat pengawasan maritim, pengawasan berbasis penginderaan jauh dan satelit. Dalam konteks penanggulangan *IUU fishing*, K/L dapat mengusulkan kerja sama pertukaran informasi. Dalam konteks *blue economy*, K/L dapat mendorong peran AS pada pembiayaan industri maritim yang ramah lingkungan.
 - h. Penanggulangan Bencana
K/L mengusulkan keterlibatan AS dalam peningkatan kapasitas AHA Centre. Bantuan AS dapat diarahkan pada penanganan situasi darurat yang sering terjadi di kawasan, salah satunya kebakaran hutan dan lahan gambut.
 - i. Pemberdayaan Perempuan
K/L mendukung inisiatif AS untuk meningkatkan partisipasi perempuan di bidang sains dan pemberdayaan peran perempuan dalam ekonomi.
 - j. Kerja Sama Sub Regional
K/L akan menjajaki keterlibatan AS pada IMT-GT, namun hal ini perlu melihat kesiapan kerangka IMT-GT sendiri.
5. K/L pengampu badan sektoral akan melakukan *assessment* lebih lanjut terhadap area yang sudah diidentifikasi dan menentukan proyek kerja sama yang ingin diajukan berdasarkan kepentingan nasional.
 6. Posisi Indonesia terkait area kerja sama tersebut akan menjadi panduan bagi Setnas dalam mengidentifikasi prioritas *ASEAN – U.S. Comprehensive Strategic Partnership* yang saat ini sedang dibahas di tingkat *ASEAN Committee of Permanent Representatives*.